

PERAN GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) DALAM MENDORONG PERCEPATAN *CASHLESS SOCIETY* DI INDONESIA

Qanaya Bintang Santoso

Universitas Mulawarman

qqqanayabss@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of inflation and investment on economic growth in Indonesia. Inflation and investment are macroeconomic factors that affect Indonesia's economic growth. The study used a quantitative approach to the type of descriptive research. The Data used is secondary time series data for the period 2018-2022 obtained from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia, and various supporting sources, then analyzed using multiple linear regression. The results showed that inflation has a negative relationship with economic growth, while investment has a positive and significant effect on economic growth. Simultaneously, both variables affect economic growth with Adjusted R Square value of 42.4%, while the rest are influenced by other variables outside the study. Therefore, inflation control and increased investment needs to continue to be carried out to support Indonesia's sustainable economic growth.

Keywords: *Inflation, Investment, Economic Growth*

Abstrak

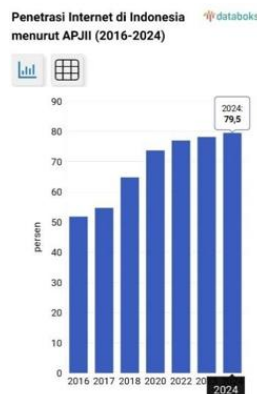
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Inflasi dan investasi menjadi faktor makroekonomi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder time series periode 2018–2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan berbagai sumber pendukung, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 42,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi perlu terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Perubahan dalam sistem pembayaran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi memicu adanya transisi perilaku masyarakat menuju *cashless society*. Sistem pembayaran yang

semula dilakukan secara tunai atau menggunakan uang kartal mulai bertransformasi menjadi sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan APMK (alat pembayaran menggunakan kartu) dan uang elektronik (Widiyati et al., 2023). *Cashless society* menggambarkan situasi ekonomi ketika transaksi dilakukan melalui transfer informasi digital sebagai representasi elektronik dari uang (Parmar, 2018). *Cashless society* memiliki dampak positif terhadap perekonomian negara. Kelancaran sistem pembayaran suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran ekonomi negara tersebut (Mulyana et al., 2022). Selain itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Arvidsson, (2019) bahwa dari perspektif ekonomi makro, terdapat indikasi kuat bahwa masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari mengganti pembayaran tunai dengan pembayaran kartu debit. Oleh sebab itu, *cashless society* diupayakan oleh bank sentral untuk mewujudkan perekonomian yang lebih modern.



Pada awal tahun 2024, tingkat pengguna internet di Indonesia mencapai 79,5% atau setara dengan 221.563.479 jiwa dari total populasi Indonesia dengan jumlah 278.696.200 jiwa. Bank Indonesia juga melaporkan, pada tahun 2023, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) meningkat 43,45% (yoy) sehingga mencapai Rp835,84 triliun, namun nilai transaksi menggunakan APMK turun sebesar 0,81% (yoy) atau mencapai Rp8.178,69 triliun. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berpotensi besar dalam mengembangkan *cashless society* karena memiliki jumlah penduduk ratusan juta jiwa dan diiring dengan tingkat persentase pengguna internet yang tinggi pula.

Meskipun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam mengadaptasi konsep *cashless society* di Indonesia, yaitu kekhawatiran akan kebocoran data pribadi saat melakukan

pembayaran digital. Thomas et. al dalam (Dimitrova et al., 2019) menyebutkan perlunya pemahaman yang lebih dalam tentang masalah keamanan karena penipuan dan serangan peretas berkaitan erat dengan metode pembayaran digital. Selain itu, literasi digital yang rendah menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan metode pembayaran digital yang aman dan bertanggung jawab. Kesiapan individu dalam memahami teknologi pembayaran menjadi faktor utama dalam membentuk masyarakat non tunai untuk mengadopsi teknologi pembayaran merupakan faktor pembentuk utama dalam masyarakat non tunai (Hidayah et al., 2023).

Tantangan yang muncul dalam upaya perwujudan *cashless society* perlu dihadapi dengan campur tangan bank sentral sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter. Pada tahun 2014, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar. GNNT diharapkan mampu meminimalkan risiko kriminalitas, seperti pencurian dan pemalsuan uang, meningkatkan efisiensi dan efektivitas transaksi. Dengan mengurangi transaksi tunai, maka kriminalitas dan kehilangan angka yang terekam dalam PDB akan berkurang pula (Sari & Ririt, 2020). Puncak dari perluasan penggunaan instrumen non tunai melalui GNNT adalah membentuk *cashless society* (Sianturi, 2019). BI bertugas dalam penetapan regulasi dan melakukan pengawasan serta mengembangkan GNNT sebagai fasilitator dalam percepatan menuju *cashless society* (Imron, 2021). Dengan demikian, GNNT mampu mengatasi tantangan dari perkembangan *cashless society* di Indonesia.

Cashless society mengubah kebiasaan transaksi masyarakat menjadi non tunai yang jauh lebih mudah. Kelancaran transaksi akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fabris (2019) bahwa masyarakat tanpa uang tunai akan meningkatkan pendapatan negara, dengan efek domino berupa penurunan defisit fiskal dan utang negara. Akan tetapi, terdapat berbagai tantangan dalam *cashless society*, seperti kekhawatiran akan kebocoran data dan rendahnya literasi digital. Tantangan tersebut perlu diatasi dengan menjalankan Gerakan Nasional Non Tunai.

Permasalahan di atas menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Gerakan Nasional Non Tunai dalam Mendorong Percepatan *Cashless Society* di Indonesia”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan cara mengumpulkan referensi dari segala sumber literatur atas landasan teori yang relevan dengan permasalahan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti ingin mendeskripsikan peran Gerakan Nasional Non Tunai secara rinci dan mendalam untuk mempercepat perkembangan *cashless society* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal ilmiah. Penelitian ini dikumpulkan berasal dari data sekunder berupa jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 2019-2024 dan dokumen publikasi yang dikeluarkan oleh website Bank Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Gerakan Nasional Non Tunai

Bank Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sistem keuangan nasional melalui GNNT. Komponen utama dalam perubahan cara pembayaran dari tunai menjadi non tunai, yaitu dengan elektronifikasi. Yue et al. (2022) menyebutkan para pembuat kebijakan meyakini bahwa mempercepat implementasi elektronifikasi sangat penting untuk mendorong ekosistem ekonomi digital. Program elektronifikasi yang ada di Indonesia mencakup elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, elektronifikasi bantuan sosial, dan elektronifikasi transportasi.

Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Elektronifikasi berperan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti optimalisasi pendapatan asli daerah, perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah, peningkatan akses keuangan pemerintah daerah, dan penguatan sistem pengendalian keuangan secara sistematis (Satria et al., 2023). Berdasarkan Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemda yang termasuk ke dalam kategori digital mencapai 399

Pemda atau sebesar 73,6%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi dan keuangan Pemda terhubung dengan sistem perbankan sebagai pengelola RKUD untuk mendukung transaksi non tunai dan tersedianya instrumen pembayaran melalui kerja sama Bank Pengelola RKUD. Implementasi dari elektronifikasi ini diukur melalui layanan transaksi Pemda melalui berbagai kanal pembayaran untuk melakukan berbagai transaksi. Dalam penelitian Herlen et al. (2021), Pemda Kota Padang dan Kabupaten Pati sama-sama melakukan transaksi non tunai pada belanja operasi, serta Pemda Kabupaten Cilacap menerapkan transaksi non tunai untuk penerimaan ataupun pengeluaran daerah.

Elektronifikasi bantuan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan PIP (Program Indonesia Pintar) diintegrasikan ke dalam Kartu Kombo. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai melalui kartu seperti KKS dan KIP lebih praktis sebab masyarakat tidak perlu menunggu uang tunai tersebut datang ke rumah mereka, namun mereka bisa mendapatkannya sendiri dengan tarik tunai di mesin ATM (Prasetyo et al., 2024). BI melakukan kerja sama dengan kementerian lain, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset. Dan Teknologi dalam menjalankan elektronifikasi bantuan sosial ini.

Elektronifikasi transportasi diterapkan pada transportasi darat, penyeberangan, dan laut serta transportasi berbasis rel sesuai dengan prinsip Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan terbuka untuk semua penerbit Uang Elektronik (non-eksklusif). BI bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi atau Dinas Perhubungan setempat agar masyarakat di seluruh negeri dapat memperoleh kemudahan dalam akses perolehan instrumen pembayaran dan layanan top up, serta keandalan peralatan alat transaksi di masing-masing moda transportasi.

Peran Gerakan Nasional Non Tunai dalam Mendorong Percepatan *Cashless Society*

GNNT wajib mengedukasi masyarakat tentang literasi digital sebab Widyastuti et al. (2024) mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki literasi digital yang lebih baik akan lebih intensif dalam menggunakan dan mendapatkan akses terhadap sistem keuangan. Penelitian

yang dilakukan oleh Pohan (2018) memperkenalkan salah satu edukasi yang dilakukan oleh BI sebagai bentuk GNNT, yaitu melakukan studi ekskursi kepada mahasiswa dan pelajar di gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan setiap 2 kali dalam seminggu.

Tabel 1. Kompetensi Literasi Digital Japelidi

No	Kompetensi	Definisi
1	Mengakses	Kompetensi dalam mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital
2	Menyeleksi	Kompetensi dalam memilih dan memilah berbagai informasi dari berbagai sumber yang diakses dan dinilai dapat bermanfaat untuk pengguna media digital
3	Memahami	Kompetensi memahami informasi yang sudah diseleksi sebelumnya
4	Menganalisis	Kompetensi menganalisis dengan melihat plus minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya
5	Memverifikasi	Kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis
6	Mengevaluasi	Kompetensi dalam mempertimbangkan mitigasi resiko sebelum mendistribusikan informasi dengan mempertimbangkan cara dan platform yang akan digunakan
7	Mendistribusikan	Kompetensi dalam membagikan informasi dengan mempertimbangkan siapa yang akan mengakses informasi tersebut
8	Memproduksi	Kompetensi dalam menyusun informasi baru yang akurat, jelas, dan memperhatikan etika
9	Berpartisipasi	Kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya
10	Berkolaborasi	Kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat dan etis dengan bekerjasama pemangku kepentingan lainnya

Selain itu, bentuk GNNT dalam meningkatkan literasi digital masyarakat adalah dengan program “Siberkreasi GNNT”. Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) menggunakan 10 kompetensi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. 10 kompetensi tersebut sudah dibagikan dalam berbagai aktivitas, seperti penyusunan buku literasi digital, penelitian maupun kampanye melawan hoax COVID-19 (Astuti et al., 2021). GNNT berperan untuk terus melakukan sosialisasi dan kampanye agar kesadaran masyarakat mengenai manfaat transaksi non tunai meningkat. Pada tahun 2023, BI meluncurkan program "GNNT Goes to Campus" untuk mensosialisasikan *cashless society* kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sosialisasi lain berbentuk kampanye media, seperti iklan, poster, media sosial, dan media online lainnya.

GNNT juga berperan dalam pengembangan produk dan layanan pembayaran digital. Bank Indonesia menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) sebagai acuan kebijakan sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital. Visi-Visi SPI 2025 diwujudkan dalam program strategis BI dengan kementerian, lembaga, dan industri terkait (Susila Atmaja & Hartono Paulus, 2022). Program-program yang diluncurkan oleh BI, seperti open banking, BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel secara real-time, dan program lainnya adalah bentuk inovasi dari

SPI 2025. Putri et al. (2020) menyebutkan tersedianya akses untuk memfasilitasi layanan akan mempengaruhi niat untuk menggunakan layanan tersebut. Pembaharuan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melakukan.

Kesimpulan

Kemajuan teknologi mendorong adanya perubahan masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai. Cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai memberikan kemudahan kepada masyarakat dan kelancaran dalam perekonomian suatu negara. Namun, literasi digital yang rendah dan kekhawatiran akan kebocoran data menjadi penghambat dalam menuju cashless society. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) hadir sebagai jawaban untuk tantangan cashless society di Indonesia. GNNT memiliki program yang disebut elektronifikasi, meliputi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, elektronifikasi bantuan sosial, dan elektronifikasi transportasi. Elektronifikasi sebagai program dari GNNT diyakini mampu menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien. Dalam mewujudkan cashless society, GNNT berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai literasi digital dan mensosialisasikan GNNT agar kesadaran masyarakat meningkat. Selain itu, BI perlu mengembangkan produk dan layanan pembayaran digital sebagai bentuk dari Gerakan Nasional Non Tunai. Bank Indonesia sebagai penyelenggara dari Gerakan Nasional Non Tunai perlu memaksimalkan program-program serta pemenuhan peran agar cashless society dapat terwujud dengan cepat.

Daftar Pustaka

- Aeni, I., Wiralaga, H., & Iranto, D. (2023). The Effect of Non-Cash Payment Transactions on the Velocity of Money in Indonesia. *Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues*, 2(2), 511–527.
- Arvidsson, N. (2019). *Building a Cashless Society The Swedish Route to the Future of Cash Payments*. Springer. <http://www.springer.com/series/8876>
- Dimitrova, I., Öhman, P., & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the limited choice of payment methods in terms of cashless society: Bank customers' perspective (work in progress). *ACM International Conference Proceeding Series*, 45–48. <https://doi.org/10.1145/3340017.3340034>

- Fabris, N. (2019). Cashless Society - The Future of Money or a Utopia? *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 8(1), 53–66. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2019-0003>
- Herlen, A. T., Putriana, V. T., & Yohana, D. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1) 80. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1235>
- Hidayah, N., Waspada, I., & Sari, M. (2023). THE DYNAMICS OF CASHLESS SOCIETY: A SYSTEMATIC REVIEW. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*, 5(15), 07–16. <https://doi.org/10.35631/aijbes.515002>
- Imron, A. (2021). SOSIALISASI GNNT MELALUI INSTRUMENT PEMBAYARAN BERBASIS QRIS PADA UMKM DIKOTA SERANG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7). <http://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Astuti, S. I., Prananingrum, E. N., Rahmiaji, L. R., Nurhajati, L., Lotulung, Leviane. J. H., & Kurnia, N. (2021). BUDAYA BERMEDIA DIGITAL. *Kementrian Komunikasi dan Informatika*.
- Sari, D. K., & Ririt, riani S. S. (2020). Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Journals of Economics Development Issues (JEDI)*, 3(2), 361–376.
- Mulyana, E., Tetep, T., Hamdani, N. A., & Uno, I. C. (2022). Less Cash Society Movement: The Impact of Using E-Money on Social Changes.
- Parmar, R. (2018). A STUDY OF CASHLESS SYSTEM AND CASHLESS SOCIETY: ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES. *INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH*, 8(4).
- Prasetyo, T. D., Merini, D., & Wulandari, S. (2024). Digitalisasi Penyelenggaraan Bansos: Studi Tentang Strategi Dan Tantangan Di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(1).
- Pohan, A. R (2018). Strategi Bank Indonesia Dalam Sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai Electronic Money (Studi Kepada Masyarakat Di Kota Medan). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Putri, A. F., Handayani, P. W., & Shihab, M. R. (2020). Environment factors affecting individual's continuance usage of mobile payment technology in Indonesia. *Cogent Engineering*, 7(1) <https://doi.org/10.1080/23311916.2020.1846832>

- Satria, D., Soewardi, T. J., & Wibowo, J. M. (2023). SMART GOVERNANCE: PAYMENT TRANSACTION ELECTRONIFICATION ACCEPTANCE IN NORTH SUMATRA PROVINCE, INDONESIA. In *Economic Horizons* (Vol. 25, Issue 1, pp. 77–90). University of Kragujevac - Faculty of Economics. <https://doi.org/10.5937/ekonhor2301085S>
- Sianturi, M. H. Br. (2019). STRATEGI BANK INDONESIA DALAM SOSIALISASI GERAKAN NASIONAL NON TUNAI ELECTRONIC MONEY (Studi Kepada Masyarakat Di Kota Medan). Universitas Brawijaya.
- Susila Atmaja, Y., & Hartono Paulus, D. (2022). PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA 1 (Vol. 51, Issue 3).
- Widiyati, S., Listyani, T., Wijayanto, E., & Akuntansi, J. (2023). STRATEGI PERCEPATAN MENUJU CASHLESS SOCIETY: STUDI PADA MASYARAKAT JAWA TENGAH. In *dkk / SENTRIKOM* (Vol. 5).
- Widyastuti, U., Respati, D. K., Dewi, V. I., & Soma, A. M. (2024). The nexus of digital financial inclusion, digital financial literacy and demographic factors: lesson from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2322778>
- Yue, P., Korkmaz, A. G., Yin, Z., & Zhou, H. (2022). The rise of digital finance: Financial inclusion or debt trap? *Finance Research Letters*.